

Jepang

Syakieb Sungkar

Ketika Rusia menyerang Ukraina, tanpa banyak diliput pers, ternyata Jepang pun sedang berkonflik dengan Rusia. Hal itu terjadi karena Jepang tiba-tiba berani mengentak-antik urusan Kepulauan Kuril, sebuah kepulauan yang direbut Rusia pada Perang Dunia II. Dari mana keberanian Jepang itu muncul? Apakah ada Amerika yang menyokong di belakangnya agar Jepang berkonflik dengan Rusia? Mari kita kembali ke masa lalu.



Gambar 1 – Kepulauan Kuril (sumber: AFP).

Pada tahun 1989, di Jepang muncul sebuah buku yang ditulis Shintaro Ishihara, Menteri Transportasi saat itu dan tokoh LDP terkemuka yang kemudian menjadi Gubernur Tokyo. Buku itu berjudul "*The Japan That Can Say No: Why Japan Will Be First Among Equals*". Ishihara terkenal karena tanggapan kritisnya terhadap praktik bisnis Amerika Serikat, dan menyarankan Jepang untuk mengambil sikap yang lebih independen dalam banyak masalah dengan Amerika, mulai dari perdagangan hingga urusan luar negeri. Judul buku itu mengacu pada visi Ishihara tentang Pemerintah Jepang yang selalu bersikap "*yes man*" kepada Amerika Serikat. Secara umum, Ishihara berpendapat bahwa Jepang adalah kekuatan dunia yang harus dihormati, dan Jepang perlu lebih percaya diri ketika berhadapan dengan AS.

Keberanian Ishihara untuk menantang Amerika itu bukannya tanpa dasar. Menurutnya Jepang itu sudah unggul di dunia. Dunia telah bergantung pada teknologi Jepang, terutama dalam produksi semikonduktor. Seharusnya Jepang menggunakan keunggulan teknologinya sebagai senjata negosiasi. Jepang bahkan dapat mengancam Amerika dengan merahasiakan hubungan perdagangannya pada Uni Soviet. Sebagai alat tawar-menawar melawan AS, Jepang bisa saja menolak untuk menjual komponen elektroniknya yang digunakan pada rudal AS. Menurutnya, kualitas barang-barang Amerika rendah karena tingkat kemampuan pekerjanya sangat minim, sedangkan pekerja Jepang mempunyai keterampilan dan pendidikan tinggi, yang menjadi keuntungan besar dan nilai tambah bagi Jepang. Karakter orang Jepang secara bawaan lebih unggul dari karakter orang Amerika.

Tentang ketegasan Jepang, Ishihara berpendapat bahwa diplomat Jepang tidak efektif dalam berurusan dengan Barat. Sehingga para diplomat terbiasa membawa-bawa pengusaha yang sudah terbiasa berurusan dengan orang asing, agar mengambil bagian juga dalam negosiasi perdagangan. Lebih jauh Jepang harus mengakhiri pakta keamanan AS-Jepang dan mempertahankan dirinya sendiri tanpa bantuan Amerika, karena dengan melepaskan diri akan mengurangi biaya dan mengakhiri ketergantungan pada AS.

Ishihara juga mengkritik Amerika, Ishihara menegaskan, orang Amerika percaya bahwa ras Kaukasia lebih unggul karena era modern didominasi oleh dunia Barat, dan prasangka ini pada

akhirnya akan menyakiti mereka. Amerika dan misionaris Kristen mencoba untuk menghapus budaya lokal dan menggantinya dengan budaya Barat. Kebanyakan bekas koloni Amerika penuh dengan masalah, sementara Jepang sendiri telah berkembang pesat. Ishihara menuduh alasan bom atom dijatuhkan oleh Amerika di Jepang - bukan di Jerman dalam Perang Dunia II - hal itu berkaitan dengan rasisme, karena orang Jerman adalah orang kulit putih dan orang Jepang tidak. Padahal ketika itu bom atom belum sempurna dan belum teruji sampai 16 Juli 1945.



Gambar 2 – Shintaro Ishihara (sumber: quotationof.com)

Shintaro Ishihara lahir di Kobe, 30 September 1932. Ia adalah seorang politikus dan penulis Jepang yang menjabat sebagai Gubernur Tokyo dari 1999 hingga 2012. Dan pernah menjadi pemimpin Partai Restorasi Jepang yang radikal. Ia adalah salah satu dari nasionalis paling menonjol dalam politik Jepang modern. Dia terkenal karena pernyataan rasisnya, pandangan xenofobia, dan kebenciannya terhadap Partai Komunis Tiongkok. Dari bukunya itu ia mengajak rekan-rekannya untuk menentang Amerika Serikat. Apabila sarannya itu dituruti, niscaya pemikiran itu akan merusak hubungan diplomatik internasional dengan Barat, terutama dengan Amerika Serikat. Apalagi Ishihara mengolok-olok kecurigaan Amerika yang masih ada sampai kini, sesuai dengan sejarah, bahwa Jepang bisa saja melakukan serangan mendadak.

Namun berbarengan dengan kecurigaan itu, Amerika membantu membangun dan memelihara Jepang dari kehancuran Perang Dunia II.

Setelah berkarir sebagai penulis dan sutradara film, Ishihara bertugas di Dewan Penasihat Partai dari 1968 hingga 1972, kemudian di Dewan Perwakilan dari 1972 hingga 1995, dan sebagai Gubernur Tokyo dari 1999 hingga 2012. Ia mengundurkan diri dari jabatan Gubernur untuk sementara waktu, karena ikut memimpin Partai Matahari Terbit. Kemudian ia bergabung dengan Partai Restorasi Jepang dan kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum 2012. Namun ia tidak berhasil mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum November 2014, dan secara resmi meninggalkan politik pada bulan berikutnya.

Pemikiran provokatif Ishihara cukup bergaung di Jepang. Sebuah karikatur muncul di surat kabar pada Maret 1990, menampilkan kartun Gunung Fuji, simbol Jepang dan kemurniannya, menghadapi tentara Amerika yang sombong dan militeristik. Gunung Fuji dalam kartun itu ditampilkan mengatakan “Jepang tidak bisa mengatakan tidak,”. Hal itu tentu saja menimbulkan pertanyaan apakah periode pascaperang Jepang sudah benar-benar berakhir, dan Jepang ingin mulai berjuang sendiri setelah bergantung pada dukungan AS selama tahun-tahun pascaperang. Di kemudian hari, pada tahun 2011, Ishihara mengusulkan Jepang untuk mempunyai senjata nuklir untuk melawan kebangkitan China.

Sistem Pengambilan Keputusan di LDP

Namun mengapa pernyataan nasionalistik Ishihara yang banyak pendukungnya itu tidak dapat dieksekusi, jawabannya terletak pada sistem pengambilan keputusan di LDP, partai yang paling berpengaruh di Jepang. Pertimbangan yang berat dan seksama pada suara para pemilih, membuat politisi LDP berstrategi membujuk atau persuasif ketika ada konflik antara kepentingan politik individu dengan partai secara keseluruhan. Bila ini terjadi maka suara individu secara pasti akan melemahkan pemimpin partai. Suara individu telah menciptakan dukungan yang kuat untuk mendesentralisasikan proses pengambilan keputusan di dalam partai. Dan pada saat yang sama, begitu ada peraturan formal legislatif yang

mendesentralisasikan kekuasaan pengambilan keputusan – seperti halnya dalam sistem komite di Amerika Serikat – maka hal ini semakin melemahkan partai dan kepemimpinan dalam pemerintahan LDP. Paradoksnya, demokrasi Jepang yang didominasi satu partai tidak mengarah pada tingkat konsentrasi kekuasaan yang tinggi. Sebaliknya, pemerintah Jepang pascaperang adalah sangat terdesentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adanya kompetisi intrapartai dalam pemungutan suara menciptakan kondisi yang kuat untuk membangun personalisasi mesin politik (*koenkai*), dan membentuk faksi-faksi intrapartai (*habatsu*). Habatsu, pada gilirannya, berfungsi sebagai mekanisme dukungan bagi politisi individu yang bersaing dengan kandidat LDP lainnya. Kandidat LDP yang mencalonkan diri dari distrik yang sama memiliki habatsu yang berbeda. Begitu sudah terpilih, habatsu memastikan bahwa politisi individu dapat menggunakan suara mereka untuk menjalankan pengaruh atas alokasi sumber daya – yaitu, anggaran dan pos-pos dalam partai dan kabinet. Pemimpin Habatsu, politisi senior yang bercita-cita menjadi Perdana Menteri, punya alasan sendiri untuk membentuk kelompok intrapartai. Jika ada yang berminat memimpin, habatsu memberi jalan untuk mengumpulkan atau menyatukan suara LDP di Diet. Suara anggota untuk pemilihan presiden partai – pada dasarnya identik dengan suara dukungan ke Perdana Menteri di mana LDP berkuasa di Jepang.

LDP lebih merupakan koalisi faksi-faksi daripada partai yang kohesif dengan disiplin. Memang, sifat kampanye pemilu yang dipersonalisasi membuat pimpinan LDP sulit untuk mengontrol proses pencalonan kandidat. Pialang kekuasaan di dalam LDP – yaitu, para pemimpin habatsu – mengembangkan sistem “*checks and balances*” yang rumit untuk mengawasi Perdana Menteri. Salah satu skema seperti itu disebut *yoto shinsa*, yang mengacu pada praktik yang mengharuskan semua undang-undang legislatif untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komite Urusan Umum (*Somukai*) sebelum Kabinet dapat menyerahkannya kepada Diet. Penting untuk dicatat bahwa Somukai bukanlah komite Pemerintah, tetapi hanya sebuah komite di dalam LDP yang tujuannya adalah untuk melemahkan kekuasaan Kabinet, organ pemerintahan formal. Somukai terdiri dari tiga puluh satu anggota Diet LDP: empat belas dipilih oleh anggota Diet LDP di Majelis Tinggi; enam dipilih oleh anggota Diet di Majelis Tinggi; dan sisanya sebelas ditunjuk oleh Presiden Partai.

Keanggotaan Somukai mencerminkan komposisi faksi dari dua Majelis, sambil membolehkan Presiden Partai memilih sekitar sepertiga dari anggotanya sendiri. Fakta bahwa Somukai mengadopsi aturan kebulatan suara daripada aturan mayoritas, akan lebih membatasi Presiden Partai LDP – yaitu, Perdana Menteri – dengan membolehkannya intrapartai melakukan veto.

Selain Somukai, Komite Riset Urusan Kebijakan (*Seichokai*) memainkan peran penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan dari bawah ke atas, di mana kepentingan politik individual dapat tercermin dalam keputusan resmi partai. Komite Penelitian Urusan Kebijakan (PARC) terdiri dari subkomite (*bukai*) yang sesuai dengan yurisdiksi kementerian masing-masing. Anggota Diet dari LDP bergabung dengan subkomite berbeda yang mencerminkan divisi fungsional dari komite tenaga kerja dengan rekan-rekan mereka di distrik yang sama untuk mengurus kebutuhan paling mendesak dari sisi kepentingan mereka. Semua proposal penting legislatif pertama-tama harus disetujui dengan suara bulat oleh masing-masing subkomite dan kemudian oleh seluruh pertemuan PARC sebelum diserahkan ke Somukai.

Terlepas dari kenyataan bahwa LDP adalah satu-satunya pihak yang memiliki hak veto dalam Diet, pada kenyataannya struktur internalnya mendukung para pemain veto intrapartai. Aturan tidak tertulis yang dijelaskan di sini mendesentralisasikan proses pengambilan keputusan dengan menciptakan pemain veto intrapartai. Oleh karena itu, di Jepang, ketua komite di LDP – yang tidak memiliki otoritas hukum – memiliki suara yang lebih besar atas kebijakan terhadap isu tertentu ketimbang Menteri Kabinet yang relevan. Sifat kolektif dari proses pengambilan keputusan di LDP sangat membatasi otoritas Perdana Menteri selama periode dominasi LDP.

Tak perlu dikatakan lagi bahwa proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi menciptakan banyak pemain veto intrapartai. Akibatnya, hal ini mengurangi kapasitas pemimpin LDP untuk memperjuangkan tuntutan internal. Mekanisme agregasi ini bekerja jauh lebih baik dalam mengalokasikan manfaat partikularistik daripada dalam membuat keputusan besar atau mengejar tujuan kolektif partai. Misalnya, ketika ada pemilihan jangka panjang, di mana keberhasilan LDP bergantung pada kemampuan menjangkau kelompok pemilih baru, namun setiap langkah dengan biaya besar dan dipaksakan untuk mencapai kelompok

konstituen inti, akan diveto. Pemain veto intrapartai dalam LDP akan mencegah pemimpin partai melakukan suatu perubahan besar. Artinya, secara struktural sangat sulit bagi pimpinan LDP untuk mengadopsi kebijakan untuk menarik kelompok pemilih baru bahkan dalam menghadapi perolehan suara yang terus menurun. Berdasarkan kebutuhan elektoral anggota LDP, kita dapat memperkirakan kekuatan relatif dari kelompok konstituen yang berbeda. Secara nasional kelompok terorganisir dengan cabang yang berkembang dengan baik di sebuah kota akan mendapatkan suara yang besar, karena mereka dapat memobilisasi sejumlah besar anggota Diet dari LDP. Kelompok seperti itu memiliki pengaruh yang lebih besar atas pemerintahan LDP daripada organisasi profesional seperti Keidaren (asosiasi bisnis besar tingkat puncak) atau Nikkeiren (asosiasi pengusaha tingkat puncak).

Desentralisasi terjadi dalam dimensi lain. Banyak kekuasaan legislatif sebenarnya didelegasikan kepada birokrasi. Lingkup pendelegasian yang diberikan menjamin birokrasi mempunyai kekuatan untuk melaksanakan agendanya. Keberadaan beberapa pemain veto dalam pemerintahan LDP mendorong birokrat mengubah agenda kekuasaan mereka menjadi hak veto. Seperti disebutkan sebelumnya, subkomite PARC yang dimiliki LDP diorganisir menurut garis kementerian. Anggota subkomite ini bekerja dalam aliansi erat dengan kementerian masing-masing. Politisi LDP mengandalkan pada birokrat untuk membuat skema yang menguntungkan kelompok konstituen mereka, dan birokrat mengandalkan sekutu LDP mereka untuk mendorong undang-undang baru yang mereka butuhkan, dan memveto perubahan yang tidak diinginkan. Sejauh proses pengambilan keputusan dalam partai yang berkuasa tetap terdesentralisasi, aliansi politik-birokrasi ini tetap sangat efektif dalam menangkis segala upaya untuk mengurangi yurisdiksi kementerian.

Strategi Politik Internasional Jepang Setelah Perang Dunia II

Dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami mengapa ajakan Ishihara untuk menjauh dari Amerika kemudian berakhir seperti teriakan di gurun pasir. Dengan struktur pengambilan keputusan yang berlapis dan terdesentralisasi, tidak mungkin sebuah kabinet akan mengambil keputusan besar. Apalagi keputusan menjauh dari Amerika, yang mana akan memunculkan

konsekwensi berlapis dan perhitungan biaya tingkat tinggi. Ishihara kemudian ditinggalkan. Nampaknya Jepang sangat traumatik untuk kembali membangun angkatan perangnya.

Setelah melihat perkembangan pesat ekonomi Jepang, yang dibantu oleh Amerika Serikat, sebagai arsitek Jepang pascaperang, Perdana Menteri Shigeru Yoshida (1948–53) mengembangkan filosofi politik internasional dari sudut pandang seorang pengusaha. Dengan filosofi dagang seorang pengusaha, maka semua faktor domestik dan internasional akan terkait dengan pembangunan ekonomi. Tetapi, pada saat yang sama, kebijakan mahal untuk mempersenjatai kembali Jepang agar terlibat dalam masalah politik internasional dan regional dihindari.

Secara garis besar, dirumuskan “Doktrin Yoshida,” yang berisi niatan Jepang hanya melengkapi persenjataan ringan belaka, sementara tujuan utamanya adalah kemakmuran ekonomi melalui ekspor sebagai prioritas nasional tertinggi, dan menghindari konflik lokal. Diplomasi ekonomi mulai berlaku ketika Yoshida merujuk ke Asia Tenggara untuk pertama kalinya dalam pidato kebijakannya pada November 1952.

Kebijakan luar negeri ini dilanjutkan oleh Perdana Menteri Nobusuke Kishi (1955–60) dengan tiga pokok karakteristik: anti-komunis, ekonomi gaya diplomasi, dan berfokus pada Asia Tenggara. Pada tahun 1957, Kishi adalah Perdana Menteri Jepang pertama yang mengunjungi negara-negara Asia Tenggara, di mana ia mengusulkan adanya “Dana Asia Tenggara”. Sejak itu ekspor Jepang ke Asia Tenggara meningkat dengan pesat, apalagi negara-negara itu menjadi sangat bergantung pada teknologi Jepang.

Selanjutnya, pada saat Perdana Menteri Hayato Ikeda (1960–64) berkuasa, Jepang sedang dalam perjalanan untuk mencapai status negara maju. Rencana Ikeda untuk “menggandakan pendapatan Jepang” secara langsung terkait dengan promosi ekspor Jepang, dan dibantu oleh arus pinjaman kredit yang besar masuk ke dalam perekonomian negara-negara berkembang. Dengan demikian strategi pinjaman kredit itu memperkuat diplomasi ekonomi yang dilakukan Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI). Tindakan seperti itu,

dianggap sebagai gerakan ekonomi yang agresif oleh banyak mitra dagang, dan karenanya, Jepang diejek sebagai “binatang ekonomi.” Sangat menarik untuk dicatat bahwa meskipun minat utama Ikeda adalah untuk mengembangkan ekonomi domestik, seperti yang ditunjukkan oleh “Rencana Penggandaan Pendapatan”-nya, perjalanan selanjutnya ke Eropa serta Asia Tenggara membuatnya sadar akan harapan yang berkembang bahwa Jepang akan mengambil peran internasional.

Fase kedua diplomasi internasional Jepang ditandai dengan perubahan politik regional, yang sebagian besar disebabkan oleh semakin intensifnya Perang Vietnam. Mengingat bertambahnya kekuatan ekonomi yang dimiliki Jepang, Perdana Menteri Eisaku Sato (1964–71), mencoba menggeser penampilan low profile Jepang yang fokus pada diplomasi “ekonomi” dengan menambahkan target yang lebih high profile, yaitu pengembalian Okinawa. Menuju tujuan ini, Sato membutuhkan dukungan damai Amerika. Untuk mempertunjukkan niat damai ini, Pemerintah Jepang lebih menekankan lagi perdamaian dan stabilitas politik, dengan cara mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara Asia.

Penting untuk dicatat bahwa ketika itu kebijakan Amerika di Asia Tenggara memasuki babak baru, yaitu ingin berperan di Asia Tenggara secara langsung dengan melindungi Vietnam Selatan dari ekspansi komunis. Pemerintah Jepang segera mendukung rencana pembangunan Asia Tenggara Presiden Johnson pada April 1965. Dengan itu Jepang diputuskan sebagai anggota aliansi Barat untuk berbagi beban ekonomi, sehingga selanjutnya modal besar mengalir ke daerah itu, dan rencana pembangunan proyek dimulai. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 1967 Perdana Menteri Sato banyak mengunjungi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam Selatan. Selama perjalanan ia menekankan tiga tujuan berikut: promosi hubungan persahabatan dengan negara-negara Asia lainnya; eksplorasi cara dan sarana untuk mempertahankan dan memelihara perdamaian dan stabilitas di Asia; dan penguatan kerjasama sosial ekonomi. Di mana kebijakan luar negeri Jepang di wilayah sesungguhnya mencerminkan lebih jelas kebijakan Washington untuk Asia Tenggara. Aktivisme Jepang dalam kebijakan luar negeri berlanjut sampai kekalahan Amerika di Vietnam pada tahun 1975. Amerika kemudian mengembalikan Okinawa pada tahun 1972.

Fase ketiga diplomasi internasional Jepang dimulai dengan berakhirnya Perang Vietnam dan, sebagai hasil penilaian kembali kebijakan luar negerinya, Jepang mengupayakan kebijakan yang independen dari Amerika. Melalui Doktrin Fukuda pada tahun 1977, Jepang memulai kebijakan luar negeri yang otonom di Asia Timur dan Selatan. Setelah tahun 1977, ASEAN menikmati status khusus dalam politik luar negeri Jepang. Keteraturan kunjungan Perdana Menteri membantu mempertahankan status yang disukai ini. Selanjutnya, berpusat pada kebijakan "Dukungan kepada ASEAN", kebijakan Asia Tenggara Jepang telah semakin disinkronkan dengan pencarian ASEAN untuk stabilitas regional dan perdamaian.

Penutup

Kita dapat melihat bahwa kebijaksanaan luar negeri Jepang sejak Perang Dunia sampai pada tahun 1977 selalu terikat dengan Amerika. Jepang baru mulai menjadi otonom dalam strategi luar negerinya sejak adanya doktrin Fukuda. Namun bukan berarti Jepang kemudian akan terbebas sama sekali dari Amerika dan Barat pada umumnya, setidaknya sejak tahun 1960 Jepang terlibat dengan banyak aliansi yang berporos ke Amerika.

Aliansi itu didasarkan oleh beban kesejarahan setelah Perang Dunia II. Di mana Amerika Serikat mengizinkan Jepang untuk mempertahankan kaisarnya — Hirohito — setelah Jepang kalah Perang. Namun, Hirohito harus melepaskan status ketuhanannya dan secara terbuka mendukung konstitusi baru Jepang. Konstitusi Jepang yang disetujui AS memberikan kebebasan penuh kepada warganya, untuk membentuk Parlemen atau Diet, dan menolak kemampuan Jepang untuk berperang. Ketentuan itu, dicantumkan pada Pasal 9 konstitusi Jepang. Hal itu jelas merupakan mandat dan reaksi Amerika terhadap Perang. Bunyinya, “Jepang bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, orang Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak berdaulat bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan internasional..... Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan. Hak berperang negara tidak akan diakui.”

Konstitusi Jepang pasca perang menjadi resmi pada 3 Mei 1947, dan warga negara Jepang memilih badan legislatif baru. AS dan sekutu lainnya menandatangani perjanjian damai di San Francisco yang secara resmi mengakhiri perang pada tahun 1951. Dengan konstitusi yang tidak mengizinkan Jepang untuk mempertahankan diri, AS harus mengambil tanggung jawab itu. Ancaman komunis dalam Perang Dingin sangat nyata, dan pasukan AS telah menggunakan Jepang sebagai basis untuk memerangi agresi komunis di Korea. Dengan demikian, Amerika Serikat yang pertama mengatur serangkaian perjanjian keamanan dengan Jepang.

Bersamaan dengan perjanjian San Francisco, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian keamanan pertama mereka. Dalam perjanjian itu, Jepang mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan personel angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara di Jepang untuk pertahanannya. Pada tahun 1954, Diet mulai menciptakan JDSF, pasukan pertahanan diri di darat, udara, dan laut Jepang. JDSF pada dasarnya adalah bagian dari pasukan polisi lokal karena adanya pembatasan undang-undang. Namun demikian, Jepang telah diajak Amerika untuk mengikuti sebuah misi dengan pasukan Amerika di Timur Tengah sebagai bagian dari Perang Melawan Teror. Amerika Serikat juga mulai mengembalikan sebagian pulau Jepang kembali ke Jepang untuk kontrol teritorial. Itu dilakukan secara bertahap, mengembalikan bagian dari pulau Ryukyu pada tahun 1953, Bonin pada tahun 1968, dan Okinawa pada tahun 1972.

Pada tahun 1960, Amerika Serikat dan Jepang menandatangani Treaty of Mutual Cooperation and Security. Perjanjian itu memungkinkan AS untuk menjaga pasukan di Jepang. Pada tahun 2009, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Jepang Hirofumi Nakasone menandatangani Perjanjian Internasional Guam (GIA). Perjanjian tersebut menyerukan pemindahan 8.000 tentara AS ke sebuah pangkalan di Guam. Pada tahun 2011, Clinton dan Menteri Pertahanan AS Robert Gates bertemu dengan delegasi Jepang, menegaskan kembali aliansi militer AS-Jepang. Pertemuan Konsultasi Keamanan, selevel Departemen Luar Negeri, untuk menegaskan tujuan strategis bersama regional dan global serta menyoroti cara-cara untuk memperkuat kerja sama keamanan dan pertahanan.

Baik Amerika Serikat maupun Jepang tergabung dalam berbagai organisasi global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia, G20, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Koperasi Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Keduanya telah bekerja sama dalam isu-isu seperti HIV/AIDS dan pemanasan global. Melihat perkembangan luar negeri Jepang yang selalu serasi dengan Amerika, nampaknya impian Ishihara untuk berpisah akan jauh dari kenyataan. Apalagi saat ini Amerika sedang membutuhkan partner dalam persiapan Perang Dunia III, maka daya cengkram Amerika terhadap Jepang lebih diperkuat, kalau perlu Jepang akan dipersenjatai. Sehingga pasal 9 konstitusi Jepang akan diamandemen, agar Jepang dapat terjun ke dalam Perang Dunia III.

Sumber Bacaan

- Estevez-Abe, Margarita (2008). *Welfare and Capitalism in Postwar Japan*. New York: Cambridge University Press.
- Fackler, Martin (8 Desember 2012). *A Fringe Political Moves to Japan's National Stage*. New York Times.
- Hunt, Michael (2004). *The World Transformed: 1945 to the Present*. New York: Oxford University Press.
- Ishihara, Shintaro (1989). *The Japan That Can Say No: Why Japan Will Be First Among Equals*. New York: Simon & Schuster.
- Jones, Steve (12 Agustus 2019). *The United States and Japan After World War II*. ThoughtCo.
- Lewis, Michael (20 Januari 1991). *The Samurai Behind the Bow: The Japan That Can Say No, Why Japan Will Be First Among Equals*. Los Angeles Times.
- Sudo, Sueo (2002). *The International Relations of Japan and South East Asia, Forging a New Regionalism*. London & New York: Routledge.
- Tao, Amy. *Ishihara Shintaro, Japanese writer and politician*. Britannica.
- The Diplomat (8 Maret 2011). *Ishihara: Japan Needs Nuke*. thediplomat.com